

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amran Suardi, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Depok : Rajawali Pers.

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsi, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Arini Nur Annisa, 2023, "Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Teori, Konsep dan Pengujian", Makassar : Sulbatern Inti Media.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika.

Eka Deviani dan Rifka Yudhi, 2020, Hukum Kepegawaian : Historis dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Bandar Lampung : Pusaka Media.

Eko Prasajo, 2009, Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi), Jakarta : Salemba Humanika.

Eny Kusdarini, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Administrasi Negara, Yogyakarta : UNY Press.



Faisal Abdullah, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta : Rangkang Education dan PuKAP.

Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung : PT Alumni.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika.

Liberti Pandiangan, 2019, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bogor : Mitra Wacana Medi.

Manan Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum.

Marbun, S.F., 2001. Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, dalam S.F. Marbun dkk (penyunting)., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara Yogyakarta: UII Press.

Nur Alam, dan Harmon Harun, 2007, Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002- 2004, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2018, Hukum Kepegawaian, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Ridwan HR, 2020, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Cet 16. Rajawali Pers.

nny Hanitijo Soemitro, 2009, Metodologi Penelitian Hukum dan i, Jakarta : Ghalia Indonesia.



Satrio Wibowo, 2022, Hukum Kepegawaian, Tulungagung ; Biru Atma Jaya.

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Malang : Setara Press.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Bisnis, Cet 12, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Wahyudi Kumoroto, 2013, Etika Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SKRIPSI DAN TESIS

Rohmatun Nida, 2021, Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Andi Meuthia AM, 2021, Evaluasi Pelaksanaan Mutasi dan Promosi dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bulukumba, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Indarwati dan Ch. Merry, 2013, Optimalisasi Pengawasan Inspektorat en Magelang Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (governance), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya.



Erna Sukmawati, 2020, Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

JURNAL

Abdul Kadir, *et.al*, 2021, Pengaruh Demosi, Mutasi dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 4 No 2.

Abdul Razak, 2005, Peraturan Kebijakan dan Kewenangan Diskresioner dalam Tata Hukum Nasional, *Jurnal Amanna Gappa* Vol 13 Nomor 1.

Alva Beriansyah, *et.al*, 2022, Konsistensi Sistem Merit Pada Pemilihan Jabatan Tinggi di Pemerintah Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Sosial (Publicio)* Vol 4 No. 1.

Arini Nur Annisa, *et.al*, 2022, Government Supervision Of The Lights Fulfilment Of Housed Workers In The Transition Period, *Awing Long Law Review*, Vol.5 Nomor 1.

Fadlan Hidayat, *et.al*, Kebijakan Bupati Terhadap Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.



niah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020.

Iwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2018, Hukum waian, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Solechan, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Administrative Law & Governance Journal, Vol 3 Issue 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen ASN

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi

Peraturan Bupati Takalar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



E

an, 2023, “Hanya Terjadi di Pemkab Takalar, Satu Jabatan Diduduki
ng Pejabat”, Sulsel Berita, edisi 18 Februari 2023, diakses melalui

(<https://sulselberita.com/2023/02/18/hanya-terjadi-di-pemkab-takalar-satu-jabatan-diduduki-dua-orang-pejabat/>) pada 25 September 2023

Januar Bil Huda dan Risqa Tri Oktaviani, 2021, Memahami Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, edisi 21 Desember, diakses melalui (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahani-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik>) pada 12 November 2023

KBBI Daring, diakses melalui (<https://kbbi.web.id/pegawai>) pada 12 November 2023

KBBI Daring, diakses melalui (<https://kbbi.web.id/pengawasan>) pada 18 November 2023

Nafiatul Munawaroh, 2023, 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya, Hukum Online.com, edisi 21 Juli, diakses melalui (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-lt62d8f9bedcda1/>) pada 20 November 2023

Sahabuddin Jaya, “SK Ganda Kabid Kebersihan DLHP Takalar Menuai Polemik”, Lambusi News, edisi 18 Februari 2023, diakses melalui (<https://lambusi.com/2023/02/18/sk-ganda-kabid-kebersihan-dlhp-takalar-menuai-polemik/>) pada 25 September 2023



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jend. Sudirman No. 26 Telpn No. (0418) 323621 Faksimile No (0418) 323621

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. IRWAN
NIP : 196409101990011003
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Zaimina Zalfaa Antawirya
NIM : B021201075
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data selama 30 hari sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Mutasi Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Takalar*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Takalar, 29 Februari 2024

Kepala BKPSDM



Drs. IRWAN
NIP : 196409101990011003
Pangkat : Pembina Utama Muda





PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: T/0353/HM.07-27/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismu Iskandar
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Zainina Zalfaa Antawirya
NIM : B021201075
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Judul Skripsi : ***“Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Takalar”***

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Februari 2024 s.d. Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Kepala Perwakilan



Ismu Iskandar



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR